



Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Balai Rumah Dinas Bupati Kampar, menjadi langkah memperkuat sinergi dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan dihadiri Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadani Indra Tektona, Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau Bambang Pratama, Wakil Bupati Kampar Misharti, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan.

"Melalui kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia ini, kita berharap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kampar semakin baik, sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya, Selasa (7/7/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar juga menyerahkan Bupati Award Pelayanan Publik Tahun 2026 kepada OPD, kecamatan, dan pemerintah desa yang dinilai berprestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Kampar Misharti mengatakan penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadani Indra Tektona mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan terbaik.

"Sinergi ini merupakan komitmen bersama kedua belah pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kampar agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan prima," katanya.

Usai penandatanganan MoU, jajaran Ombudsman RI bersama Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar untuk melihat langsung kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penulis : Satria Yonela Putra

Editor : Delvi Adri

Kategori : Serantau

